

**SKRIPSI**

**PENGARUH MANAJEMEN ORGANISASI TERMINAL ANGKUTAN DARAT  
TERHADAP RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN GOWA**

**FITRIA DJAUHARI**

**10572 02905 10**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**MAKASSAR**

**2014**



**PENGARUH MANAJEMEN ORGANISASI TERMINAL ANGKUTAN DARAT  
TERHADAP RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH**

**FITRIA DJAUHARI**  
**10572 02905 10**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**MAKASSAR**

**2014**

21/09/2022

kep  
Sub. Alumni

P/0608MAN/22cp

DJA

P



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Fitria Djauhari, Nim 10572 02905 10** ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : **091 TAHUN 1435 H/ 2014 M** dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari **Sabtu 15 november 2014 M** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, -----

November 2014

### PANITIA PENGUJI

- Pengawas Umum : Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. ( )  
(Rektor Unismuh Makassar)
- Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A ( )  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM ( )  
(WD I Fak. Ekonomi dan Bisnis)
- Penguji
1. Drs. H. Mahmud Nuhung, MA ( )
  2. Moh. Aris Pasigai, SE, MM ( )
  3. Dr. H. Muhammad Rusydi, SE., M.Si ( )
  4. Samsul Rizal, SE., MM ( )



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Nama : FITRIA DJAUHARI  
Stambuk : 10572 02905 10  
Jurusan : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Skripsi ini telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk diujikan

Makassar, Nopember 2014

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Moh. Aris Pasigai, SE., MM

  
Edi Jusriadi, SE., MM

Diketahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan manajemen



  
Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., M.A.  
NBM. 497 794

  
Moh. Aris Pasigai, SE., MM  
NBM. 1093 485



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, puji tanda kesyukuran penulis persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi akhirnya dapat dirampungkan. Shalawat dan salam penulis kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, para sahabatnya serta ummatnya yang senantiasa iltizam di atas kebenaran hingga akhir zaman. Adapun judul skripsi ini adalah **"Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Pengangkutan Darat Terhadap Tetribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa"**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, walaupun telah diusahakan secara maksimal. Namun, peneliti berharap agar skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca tentang kinerja keuangan daerah, khususnya daerah Kabupaten Gowa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dan segala apresiasi yang telah disumbangkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya atas doa yang telah memberi dukungan serta lantunan doa yang senantiasa tercurah dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mahmud Nuhung, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Moh. Aris Pasigai, SE., MM selaku Ketua Jurusan Manajemen sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak partisipasinya dalam memberikan nasehat, bimbingan dan petunjuk selama menempuh pendidikan.



4. Bapak Edi Jusriadi, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan-arahan dalam proses penyusunan proposal hingga Skripsi.
5. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , khususnya pada program studi Manajemen yang telah memberikan bimbingan dan bantuan berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses pendidikan.
6. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Muh. Hijrah, SE.,MM dan kepala seksi Syahabuddin S.Sos, Bapak Lahuddin serta segenap staf yang telah mengizinkan dan membantu dalam proses penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan Manajemen 12 yang saling *sharing* dalam penyelesaian proposal dan skripsi.
8. Sahabatku Ida, nana, Phitto', sharnas, Racun the Gank, ayu, k'nuni, k' sukma, dan adi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, yang selalu menguatkan. Terimakasih untuk persahabatan yang begitu indah.
9. Keluarga besar KSR PMI Unit 114 Unismuh, Pramuka Ambalan Tumanurung dan R.A Kartini, Crew Radio Rewakofm, Teman- Teman Dishubkominfo Gowa, Teman-teman Parangta Mangkasarak (PM), Teman-teman Koom. (HIPMA) Gowa Himpunan Pelajar mahasiswa Gowa. Terimakasih untuk semuanya. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai saham dalam dunia pendidikan. Smoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat Ridho Allah SWT.

Aamiin.

Makassar, September 2014

Peneliti



## ABSTRAK

**FITRIA DJAUHARI, 2014.** Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Moh. Aris pasigai,SE.,MM dan Edi Jusriadi,SE.,MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan retribusi terminal angkutan darat dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan dan peningkatan otonomi daerah di Kabupaten Gowa. Variabel dalam penelitian ini difokuskan pada kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Gowa. Data yang digunakan adalah data keuangan APBD di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2005 sampai 2008. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Dengan melihat hasil analisis di atas, kemampuan keuangan masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan PAD baik secara ekstensifikasi, yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah, sehingga peluang untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak (retribusi). Untuk belanja rutin daerah diperlukan efisiensi sehingga belanja rutin dapat ditekan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR</b> .....	7
A. Pengertian manajemen.....	7
B. Pengertian Organisasi.....	9
C. Pengertian Manajemen Organisasi.....	15
D. Pengertian Terminal angkutan darat.....	16
E. Pengertian Retribusi.....	19
F. Dasar Penentuan Tarif Retribusi.....	28
G. Hubungan Manajemen Organisasi Terhadap Retribusi.....	29
H. Kerangka Fikir.....	31
I. Hipotesis.....	32
<b>III. METODELOGI PENELITIAN</b> .....	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
B. Metode Pengumpulan Data.....	33



C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Populasi dan Sampel .....	35
E. Metode Analisis Data .....	35
F. Defenisi Operasional .....	36
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>33</b>
A. Letak Geografis Dan Administratif Kabupaten Gowa .....	41
B. Sejarah Kabupaten Gowa .....	42
C. Tentang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika .....	47
D. Visi dan Misi .....	48
E. Struktur Organisasi .....	49
F. Tugas Dan Tanggung Jawab .....	51
<b>V. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Retribusi Daerah .....	59
B. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	63
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Retribusi Terminal ....	65
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,

Otonomi daerah adalah hak, wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah.



Adanya perkembangan teknologi dan Otonomi Daerah menuntut pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri.

Organisasi pemerintah adalah salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Karena pada hakekatnya tidak ada bangsa yang miskin atau terkebelakang. Yang ada adalah bangsa yang belum terkelola dengan baik. Hal ini umumnya tercermin dari kinerja organisasi- organisasi sektor publiknya yang sering digambarkan masih: produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi, dan kreatifitas. Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa Manajemen untuk mengatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintah berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat manajemen pemerintah berbeda dari sifat manajemen perusahaan. Dengan adanya manajemen pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk Seluruh aktifitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja, dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintah secara keseluruhan



Peningkatan retribusi daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah dimana pemanfaatan potensial daerahnya harus dilakukan secara maksimal. Karena ketika suatu daerah mengalami Peningkatan retribusi daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat membantu dalam memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan Peningkatan retribusi daerah tersebut maka akan timbul masalah dan gejala ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga atau organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Kegiatan di Terminal angkutan darat Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa salah satunya adalah retribusi, perizinan tertentu, dimana yang kesemuanya itu merupakan sumber peningkatan Retribusi Daerah. Sehingga memiliki peran dalam pembangunan dan kemajuan daerah di kabupaten Gowa itu sendiri.

Retribusi Terminal merupakan penyumbang PAD tertinggi di jajaran Dinas Perhubungan. Dilihat dari total realisasi sebesar Rp 39.447.439.832 tahun 2013.



Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan manajemen organisasi yang tepat.

Salah satu cara penggunaan manajemen organisasi yang tepat dimana untuk mewujudkan tercapainya keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu dengan mempergunakan anggaran belanja dengan sebaik mungkin.

Sejalan dengan peraturan pemerintah di atas, Halim (2002:19) mengemukakan bahwa

Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan retribusi daerah.

Pada Dinas Perhubungan yang dapat dipergunakan oleh daerah tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan retribusi daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi erat kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Peningkatan retribusi daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan Retribusi tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)



Pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Gowa diatur dalam Perda nomor 11 pasal 37 tahun 2003 tentang anggaran dan belanja daerah dan perda nomor 1 pasal 49 tahun 2004 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003.

Berdasar uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Peningkatan Retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah " bagaimana pengaruh manajemen organisasi terminal angkutan darat terhadap peningkatan retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa?".

#### **C. Tujuan Penelitian**

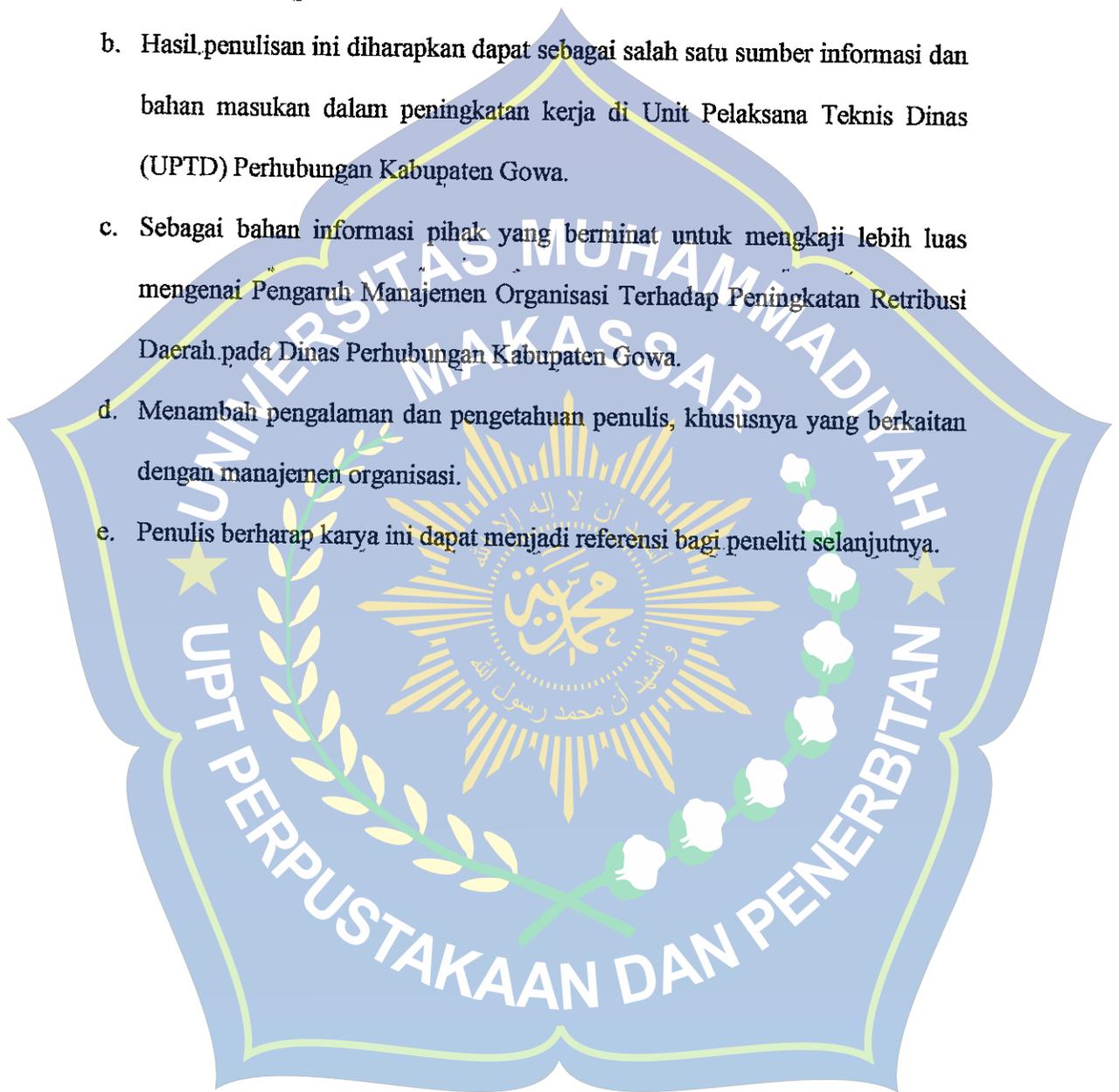
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah " untuk mengetahui pengaruh manajemen organisasi Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa ".



#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam rangka meningkatkan retribusi daerah.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat sebagai salah satu sumber informasi dan bahan masukan dalam peningkatan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan Kabupaten Gowa.
- c. Sebagai bahan informasi pihak yang berminat untuk mengkaji lebih luas mengenai Pengaruh Manajemen Organisasi Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.
- d. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan manajemen organisasi.
- e. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Manajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan (2001 : 1) adalah :

“Managemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Sedangkan pengertian manajemen menurut Stoner, J.A.F and Freeman (2004: 2) adalah sebagai berikut :

“Manajemen adalah Suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.”

Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki paling sedikit satu tujuan umum yang sama dan menyediakan ruang bagi mereka untuk mengaktualisasikan potensinya guna mewujudkan tujuan umum yang sama itu. Agar tujuan-tujuan itu bisa dicapai bersama seperti yang dikehendaki maka organisasi membutuhkan manajemen.

Organisasi (*organization*) dan pengorganisasian (*organizing*) memiliki hubungan yang erat dengan manajemen. Organisasi merupakan alat dan wadah atau tempat menejer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan



yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian merupakan salah satu fungsi organik dari manajemen dan ditempatkan sebagai fungsi kedua setelah perencanaan (*Planning*). Dengan demikian, antara organisasi dan pengorganisasian memiliki pengertian yang berbeda.

James L. Gibson c.s., sebagaimana yang dikutip oleh Winardi (2001:19), berpendapat bahwa:

“ organisasi- organisasi merupakan entitas- entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil- hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu- individu yang bertindak secara sendiri ”.

Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

#### 1. Proses

Proses adalah suatu cara yang sistematis untuk melaksanakan suatu manajemen di definisikan sebagai suatu proses karena semua manager, apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

#### 2. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada dan kegiatan mereka berdasarkan pada suatu cara, rencana dan logika.

#### 3. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menentukan orang-orang pada setiap aktifitas, penyediaan alat-



alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan pada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.

#### 4. Pengarahan

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerjasama dengan efektif dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

#### 5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana dan pengukuran serta perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

### **B. Pengertian Organisasi**

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Dan bisa didefinisikan sebagai mekanisme- mekanisme formal organisasi diolah. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam



struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Ada beberapa bentuk berbeda dari struktur organisasi dalam sebuah tim. Tim yang sudah terorganisir dan terstruktur dengan baik sangatlah penting, karena akan mengarahkan tim tersebut menjadi sebuah tim yang ahli dan cakap dalam bekerja. Pengambilan keputusan dalam sebuah tim bergantung pada bagaimana cara tim tersebut akan bekerja bersama.

a) Bentuk-bentuk organisasi:

a. Organisasi baris

Merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana, diciptakan oleh *Henry Fayol*. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi.

Kebaikannya:

- 1) Kesatuan komando terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan.
- 2) Garis komando berjalan secara tegas, karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahan.
- 3) Proses pengambilan keputusan cepat.
- 4) Rasa solidaritas tinggi.



Kelemahan:

- 1) Seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja, apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran.
  - 2) Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis.
- b. Organisasi garis dan staf

Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pimpinan didalam organisasi.

Kebaikannya:

- 1) Dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun yang kecil, serta apapun tujuan perusahaan.
- 2) Terdapatnya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli.
- 3) Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas yang terperinci.

Kelemahannya:

- 1) Rasa solidaritas menjadi berkurang, karena pegawai menjadi saling tidak mengenal.
- 2) Kesatuan komando berkurang.
- 3) Koordinasi kurang baik pada tingkat staf dapat mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan tugas.



### c. Organisasi fungsional

Organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas.

Kebaikannya:

- 1) Pembandingan tugas menjadi lebih jelas.
- 2) Spesialisasi karyawan/ pegawai lebih efektif dikembangkan.
- 3) Koordinasi berjalan lancar dan tertib.

Kelemahan:

- 1) Karyawan selalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja.
- 2) Koordinasi menyeluruh, sulit untuk dilaksanakan.

### d. Organisasi panitia

Organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja, setelah tugas selesai maka selesailah pula organisasi tersebut.

Kebaikannya:

- 1) Segala keputusan dipertimbangkan secara detail, dalam pembahasan yang dalam dan terperinci.
- 2) Kemungkinan pimpinan bertindak otoriter sangat kecil.
- 3) Koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu Team.

Kelemahan:

- 1) Proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut sehingga menghambat pelaksanaan tugas.
- 2) Tanggung jawabnya tidak jelas.



b) Macam- Macam Organisasi.

a. *Democratic Decentralized (DD)*.

Tidak memiliki pemimpin yang permanen. Koordinator dipilih untuk menangani suatu tugas yang harus diselesaikan. Koordinatorpun bisa berubah/ diganti bila ada perubahan dalam pekerjaan (task). Keputusan yang dibuat harus berdasarkan konsensus kelompok, bukan hanya wewenang satu orang saja.

Komunikasi sangatlah penting karena setiap individu harus benar-benar paham akan segala sesuatu yang harus ditangani/ dikerjakan. Sifat komunikasi antar anggota disini adalah komunikasi horizontal, karena tidak ada istilah pimpinan dan bawahan dalam bentuk organisasi ini.

b. *Controlled Decentralized (CD)*.

Memiliki satu pemimpin utama yang mengkoordinir tugas- tugas utama. Terdapat pemimpin-pemimpin sekunder yang dipilih pemimpin utama untuk mengkoordinir dan menangani sub-sub tugas yang dibagi berdasarkan kebijakan pemimpin utama. Pemimpin sekunder ini menjadi koordinator dalam sub- sub group yang dibentuk berdasarkan pembagian tugas.

Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama antar anggota dalam masing-masing sub group. Sedangkan pengambilan keputusan antar group diputuskan oleh pemimpin utama. komunikasi juga tetap diperlukan dalam satu sub group. Komunikasi dilakukan secara



### C. Pengertian Manajemen Organisasi

Manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen secara universal belum memiliki definisi yang tepat dan dapat diterima. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan tapi melalui orang lain, artinya seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, manajemen perlu melewati beberapa proses, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya.

Pada dasarnya Organisasi adalah tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, kerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (sumber daya seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen dan Organisasi memiliki hubungan yang erat, untuk mencapai suatu tujuan maka dibutuhkan kerja team, ibaratkan di suatu perusahaan seorang manajer membagikan tugas kepada anggota team nya yang terdiri dari 10 orang, 2 orang pertama mempunyai tugas menulis, 2 orang berikutnya mempunyai tugas mengedit, 2 orang selanjutnya mempunyai tugas memposting dan begitu selanjutnya, hingga menjadikan kerja sama team yang solid antara manajer dan organisasi.



#### D. Pengertian Terminal Angkutan darat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi darat untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Sementara berdasarkan PP 41 Tahun 1993, terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi

Dan berdasarkan Juknis LLAJ 1995, Terminal Transportasi merupakan:

- Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum.
- Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas.
- Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.
- Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Tipe dan Fungsi Terminal berdasarkan KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan

1. Tipe terminal penumpang terdiri dari :

- a. Terminal penumpang tipe A
- b. Terminal penumpang tipe B



c. Terminal penumpang tipe C

1. Terminal penumpang Tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal tipe A merupakan terminal penumpang yang memiliki fasilitas paling lengkap, disamping itu pembangunannya membutuhkan lahan yang cukup luas sekurang-kurangnya 5 hektar.

Syarat lokasi terminal tipe A terletak di ibukota provinsi, kotamadya atau kabupaten dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara. Selain itu lokasinya harus terletak di jalan arteri dengan kelas jalan III A, yakni jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat tidak melebihi 8 ton.

2. Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. Terminal tipe B adalah terminal penumpang yang berada setingkat di bawah terminal tipe A. Pembangunan terminal tipe ini membutuhkan lahan sekurang-kurangnya 3 hektar untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera dan 2 hektar di pulau lainnya.



Syarat lokasi terminal tipe B diantaranya terletak di kotamadya atau kabupaten dan dalam jaringan trayek AKDP. Syarat lainnya adalah terminal tipe ini harus terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-jurangnya kelas III B, yakni jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat.

3. Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Terminal Tipe C adalah terminal penumpang yang berada setingkat dibawah terminal tipe B.

Syarat lokasi terminal ini terletak di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan. Selain itu, terminal ini harus terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi III A. Terminal ini juga harus mempunyai jalan akses masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas sekitar terminal.

2. Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang
  1. Fasilitas Utama terdiri dari:
    - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
    - b. Jalur kedatangan kendaraan umum;



- c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- d. Bangunan kantor terminal;
- e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- f. Menara pengawas;
- g. Loket penjualan karcis;
- h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadual perjalanan;
- i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.

#### **E. Pengertian Retribusi**

Retribusi Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Karakteristik retribusi (<http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/pajak-retribusi-dan-sumbangan/>):

1. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku (umum).
2. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal balik langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.



3. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan yang bersangkutan.
4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomi.
5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di bagi menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ( Pasal 2 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan (Pasal 2 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Dalam Pasal 2 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.



- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
  - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- b. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial (Pasal 3 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan ( Pasal 3 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Dalam Pasal 3 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa.



- g. Retribusi Penyedotan Kakus.
  - h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
  - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
  - k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
  - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
  - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ( Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ( Pasal 4 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah ( Pasal 3 butir (3) Peraturan



Pemerintah No. 66 tahun 2001). Dalam Pasal 4 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek.

#### 1) Penerimaan Daerah

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa "Penerimaan daerah adalah semua uang yang masuk kedalam kas daerah." Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa "Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan."

##### (a) Pendapatan daerah

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa "pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan." Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa "Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan."

##### (1) Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengemukakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah selanjut disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan." Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun



2004 menyebutkan bahwa “Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”

Definisi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 menyatakan bahwa:

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 menyatakan bahwa “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

- c) Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, menyatakan bahwa:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan hasil dari perusahaan milik daerah. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah

- d) Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga .

- (2) Dana perimbangan

Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa:

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

- a. Menurut pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Menurut pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Menurut pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

(3) Lain-lain pendapatan

Menurut pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, "lain-lain Pendapatan adalah pendapatan yang bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan." Lain-lain Pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat (lampiran C.V. Butir H Permendagri Nomor 13 tahun 2006).

- a. Menurut pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Hibah adalah Penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, Pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



b. Menurut pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

(b) Pembiayaan

Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pembiayaan adalah “Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.” Menurut pasal 5 ayat 3 Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pembiayaan adalah sebagai berikut:

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- (2) Penerimaan pinjaman daerah
- (3) Dana cadangan daerah
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2) Pengeluaran Daerah

Dalam pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa “pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan.” Pengeluaran daerah terdiri atas pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.

(a) Pengeluaran belanja

Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, “Pengeluaran belanja adalah Semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.” Pengeluaran belanja meliputi belanja rutin (operasi), belanja pembangunan (modal)” (Mahmudi, 2010:88).



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



(1) Belanja rutin (operasi)

“Belanja rutin (operasi) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan bagi daerah.” Misalnya belanja gaji, tunjangan, honorarium, dan upah pegawai, belanja habis pakai, belanja perjalanan dinas, belanja sewa, dan belanja pendidikan dan pelatihan (Mahmudi, 2010:88 ).

(2) Belanja pembangunan (modal)

“Belanja pembangunan (modal) adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah asset dan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran.” Misalnya belanja pengadaan tanah, gedung, jalan dan jembatan, kendaraan, dan mesin (Mahmudi, 2010:99).

(3) Pengeluaran tidak disangka

“Pengeluaran tidak disangka adalah pengeluaran yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana,” seperti terjadinya bencana alam, Tagihan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan, dan pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan (Mahmudi, 2010:96).

(4) Transfer

Transfer di sini adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

(b) Pengeluaran pembiayaan



Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 mengemukakan bahwa "Pengeluaran pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah". Misalnya pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman daerah.

#### F. Dasar penentuan tarif retribusi.

Ketentuan secara lengkap mengenai objek dan subjek retribusi telah diatur dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana kewenangan daerah dalam pemungutan retribusi hanya ada pada penetapan tarif dan sasaran pengenaan retribusi.

Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh terminal dinamakan Retribusi Terminal ( Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 2 tahun 2002).

Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 2 tahun 2002 jasa pelayanan yang ada di terminal terdiri dari :

- a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan.
- c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang.
- d. Jasa penggunaan kios.
- e. Tempat penjualan tiket/karcis.
- f. Ruang tunggu penumpang.



g. Jasa pemasangan reklame.

h. Jasa kebersihan.

### G. Hubungan manajemen organisasi terhadap retribusi

manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Oleh sebab itu, kegiatan manajemen harus dilakukan melalui suatu pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan proses kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan fungsi manajemen yang dilakukan melalui bantuan orang sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Ada beberapa hal yaitu suatu kegiatan yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta pengawasan agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh kegiatan tidak dapat terlepas dari kegiatan manajemen. Demikian hanya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba membutuhkan manajemen sebagai alat dalam melaksanakan kegiatan. Dengan cara:

1. Menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.



4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
5. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya.
6. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja.
7. Melaksanakan pengelolaan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah di lingkungan terminal.
9. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal.
10. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, halaman, taman, peralatan dan inventaris milik Pemerintah Kota Surakarta yang berada di kompleks terminal.
11. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
12. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.
13. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
14. Melaporkan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



## H. Kerangka pikir

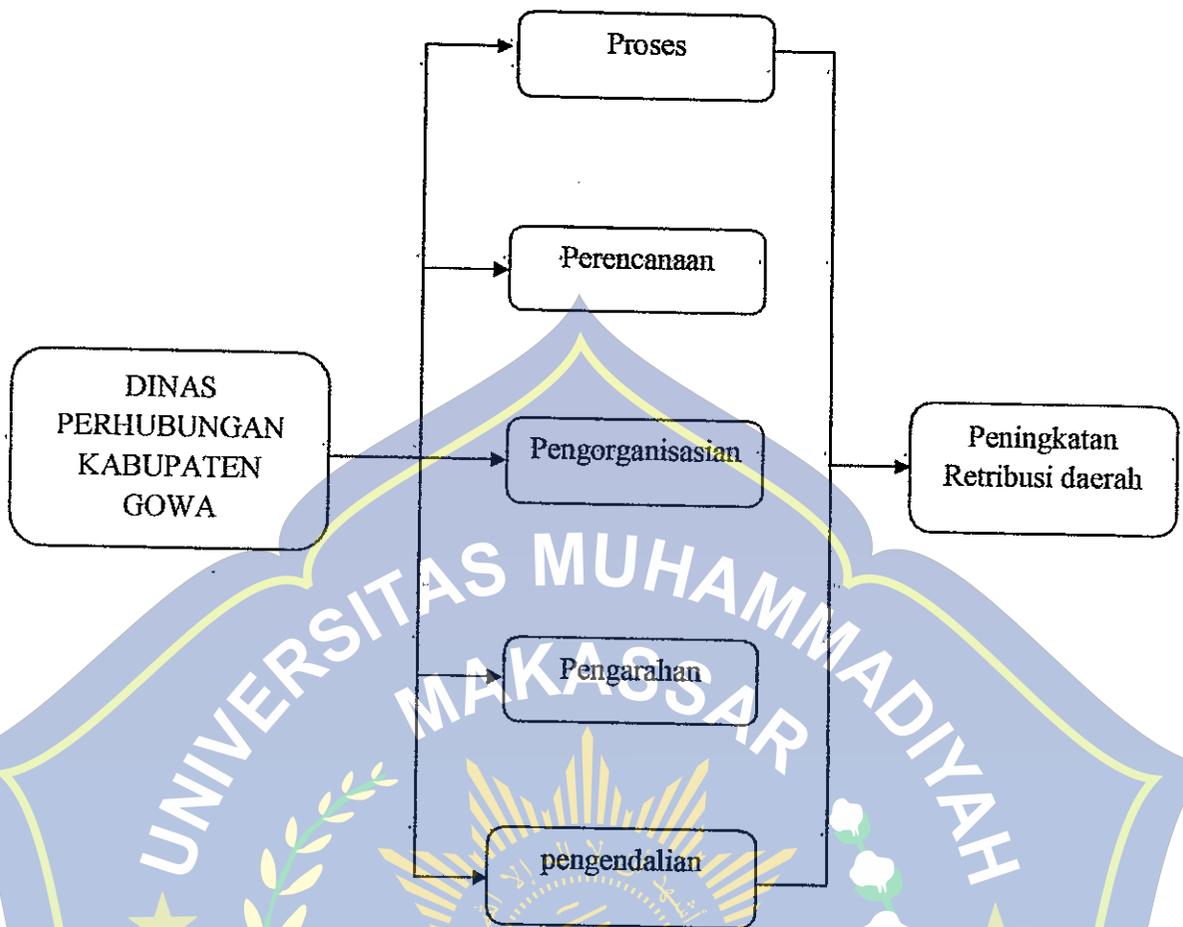
Organisasi pemerintah adalah salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba termasuk pada Kabupaten Gowa.

Kemampuan keuangan daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk menggali sumber keuangan, mengelolah dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari data keuangan daerah yang tercermin dari data APBD. Keuangan daerah terdiri dari beberapa unsur yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan terdiri atas pendapatan dan pembiayaan, dan pengeluaran terdiri atas pengeluaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pengeluaran belanja meliputi belanja rutin, belanja pembangunan dan belanja tidak terduga.

Berikut ini merupakan skema dari kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai gambaran dari alur analisis penelitian.

Secara ringkas alur kerangka pikir dapat dilihat pada:





Gambar: 1 kerangka pikir

## H. HIPOTESIS

Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan hipotesis yaitu: “Manajemen Organisasi Dinas Perhubungan berpengaruh Positif pada pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Gowa”.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Objek penelitian adalah di Sub.Bagian Umum Dan Kepegawaian, sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub. Bagian keuangan, Seksi Terminal Dan Perparkiran pada kantor Dinas Perhubungan kabupaten Gowa.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini selama 2 bulan, yaitu Agustus s/d Oktober 2014.

#### B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang relevan untuk menunjang dan memperkuat penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Metode Observasi

Metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada kantor Dinas Perhubungan kabupaten. Gowa.

##### 2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Tidak berstruktur, dimaksudkan hanya untuk melengkapi informasi yang di inginkan.



### 3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan data tertulis berupa dokumen yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

#### C. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Data Kualitatif

Merupakan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung, data tidak dinyatakan dalam bentuk angka, tetapi diuraikan dengan cara memberikan pengertian, penerangan, dan menafsirkan data yang diperoleh. Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. Moleong (2006), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

##### 2. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2004) yaitu data dengan menggunakan pengukuran-pengukuran dan pembuktian-pembuktian, khususnya pengujian hipotesis yang dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan metode statistika untuk mengukur dan membuktikan penelitian.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

Adapun 2 macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner dengan responden dan pejabat lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis seperti struktur organisasi, jumlah pegawai dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

#### **D. Populasi dan sampel**

Menurut Sugiyono (2006: 72), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah data APBD kantor Dinas Perhubungan kabupaten Gowa.

Menurut Sugiyono (2006:56), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah data APBD tahun 2007-2010, untuk mengetahui informasi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gowa paling terkini maka sampel dari penelitian ini diambil data APBD lima tahun terakhir.

#### **E. Metode Analisis Data**

Guna menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesis yang diajukan maka data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :



$$K = \frac{\sum RT}{\sum PAD} \times 100$$

Dimana :

K : Kontribusi

RT : Jumlah Retribusi Terminal

RD : Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Ukuran untuk mengetahui kemampuan Retribusi Terminal terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh Peneliti

- a. Rasio 0,00% - 10,00% (sangat kurang)
- b. Rasio 10,10% - 20,00% (kurang)
- c. Rasio 20,10% - 30,00% (sedang)
- d. Rasio 30,10% - 40,00% (cukup)
- e. Rasio 40,10% - 50,00% (baik)
- f. Rasio diatas 50,00% (sangat baik)

#### F. Defenisi operasional

##### 1. Manajemen Organisasi Terminal

Manajemen Organisasi terminal merupakan sistem yang di terapkan dalam penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi terminal dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Manajemen organisasi terminal dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama apabila mendukung strategi dalam berorganisasi, dan bila dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat.



Manajemen organisasi terminal selain berpengaruh terhadap kinerja organisasi terminal, berpengaruh terhadap kepuasan kerja, juga pendapatan-pendapatan untuk daerah sehingga berarti bahwa manajemen organisasi terminal telah dikelola dengan baik.

## 2. Retribusi daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak, atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu Retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya



alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah; Retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti: jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 4. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN, perubahan APBN, dan pertanggung jawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran



yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
- c. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
- d. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.



- e. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- f. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.





## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 Jiwa.

Kabupaten Gowa berada pada 12° 38.16" bujur timur dari Jakarta dan 5° 33.6' Bujur timur dari kutub utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12° 33.19 hingga 13° 15.7 lintang selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/ kota lain. Yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan kabupaten Maros.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jenepono.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 Kecamatan yakni; kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggi moncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompo bilu, Biring bulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran



rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni; Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo selatan.

## B. Sejarah Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah Kabupaten yang memiliki latar belakang sejarah dan menjunjung nilai-nilai seperti *assainaturu* yang artinya bersatu padu, *Sipakatau* artinya saling menghargai, *Sipakainga* artinya saling mengingatkan dan *Sipakalabbiri* saling menghormati, *Siri'na Pacce*, *Toddoppuli*, *Akkontutojeng* artinya berlaku jujur, Keterbukaan dan Transparansi, Akuntabilitas, dan *Kebhinekaan*. Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat Sembilan negeri atau daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan raja kecil. Negeri ini adalah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je,ne, Bisei, Kalling dan Sero (Bidang Administrasi dan Tata Laksana organisasi Kabupaten Gowa).

### a. Masa kerajaan

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut *kasuwiyang-kasuwiyang* dan merupakan kerajaan kecil dengan sembilan *kasuwiyang* yaitu *Kasuwiyang Tombolo*, *Lakiyung*, *Samata*, *Parang-parang*, *Data*, *Agang Je,ne*, *Bisei*, *Kalling*, dan *Sero*. Pada masa kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional. Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa'risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dan berhasil



menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkep), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. Pada masa inilah Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo.

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ri Bandang menyebarkan agama Islam di kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M. Raja I Manggerangi Daeng Manrabiah menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan Shalat jum'at untuk pertama kalinya.

Raja I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bontomanggape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Gowa, mulai dari Raja Tumanurung Bainea sampai dengan setelah era Raja Sultan Hasanuddin telah mengalami 36 kali pergantian Somba (raja).



## b. Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Timur.

Pada tanggal 17 januari 1957 di tetapkan kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di tetapkan sebagai daerah Tingkat II. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

## c. Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 february 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Laloang sebagai Kepala Daerah yang memimpin dua belas daerah bawahan distrik yang dibagi dalam empat lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing.

Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borong loe, Manuju dan Borisallo. Koordinatonya berkedudukan di sungguminasa. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolo Pao. Koordinatonya berkedudukan di Malino. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo.



Koordinatornya berkedudukan di Limbung. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan pemerintah pusat diseluruh wilayah Republik Indonesia diadakan reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan. Untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang perluasan Kotamadya Ujung pandang sebagai Ibukota Provinsi, Pemerintah Kabupaten Gowa menyerahkan dua kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu kecamatan Pa'nakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.

Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan samarnya makna jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingat Gowa justru pernah menjadi kerajaan maritim yang pernah jaya di Indonesia Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara.

Dengan dilaksanakannya undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 Kecamatan dengan 46 Desa. Sebagai akibat dari perubahan itu Pemerintah Kabupaten Gowa berupaya menempuh kebijakan yang didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan membentuk dua buah Kecamatan yaitu Somba opu dan Parangloe. Untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu,



maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di definitifkan sehingga jumlah kecamatan Gowa menjadi 9.

Pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, Kabupaten Gowa telah dipimpin oleh beberapa orang Bupati. Nama-nama Bupati Gowa dapat dilihat pada tabel 10 berikut disertai dengan periode pemerintahannya.

**Tabel 1**  
**Daftar Nama Bupati Gowa dan Masa Jabatan Masing-masing**

Urutan	Nama	Masa Jabatan
1.	ANDI IJO KARAENG LALOANG	1957 s/d 1960
2.	ANDI TAU	1960 s/d 1967
3.	K.S. MAS'UD	1967 s/d 1976
4.	H.M. ARIEF SIRAJUDDIN	1976 s/d 1984
5.	H.A. KADIR DALLE	1984 s/d 1989
6.	H.A. AZIZ UMAR	1989 s/d 1994
7.	H. SYAHRUL YASIN LIMPO	1994 s/d 2002
8.	H. HASBULLAH DJABBAR	2002 s/d 2004
9.	H. ICHSAN YASIN LIMPO	2005 s/d 2011
10.	H. ICHSAN YASIN LIMPO	2012 s/d Sekarang

*Sumber: Bidang Administrasi dan Tata Laksana organisasi Kabupaten Gowa.*

Dibawah kepemimpinan Bupati dari periode ke periode wilayah pemerintahan Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar



Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan pemukiman selain Kota Makassar. .

### **Visi Dan Misi Kabupaten Gowa**

Visi kabupaten Gowa adalah terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut adapun misi kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.
- b. Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.
- c. Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.
- d. Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu Sumber pendapatan pihak ekstern kelestarian lingkungan.

### **C. Tentang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika**

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan diresmikan pada tanggal 29 Februari 1995 yang disebut Dinas Kabupaten Gowa. pada saat itu, Berubah kembali dari Dinas LLAJ menjadi Dinas Perhungungan tgg1 3 juli 2001.

perda n03 tahun 2001 tentang perubahan struktur Dinas Kabupaten Gowa Kemudian tahun 2008 berubah kembali menjadi Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika) sampai sekarang.



Tabel II

## Daftar Nama Kepala dinas dan Masa Jabatan Masing-masing

Urutan	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. M. Nasir 'nakka'	1995 s/d 1997
2.	Drs.H. Mappagiok M.Si	1997 s/d 1998
3.	Drs. Amir Lewa (Alm)	1998 s/d 2004
4.	Drs. H. Abd Hafid Latief	2004 s/d 2005
5.	Drs. H. Taba Yusarif	2005 s/d 2006
6.	Drs. Majid Basolle	2006 s/d 2007
7.	Drs. H. Tajuddin Nur.MM	2007 s/d 2012
8.	Drs. Alwi Beddu	2012 s/d 2013
9.	H. Muh. Hijrah.SE,MM	2013 s/d Sekarang

**Tugas dan Fungsi Dinhubkominfo:**

## a. Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## b. Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelalaian kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, komunikasi dan informatika;



5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
6. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Visi Dan Misi**

Visi dari Dishubkominfo adalah Menuju Pelayanan Hubkominfo Yang Amanah, Berdaya Guna Dan Berkelanjutan. Sedangkan misinya adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Revitalisasi, modernisasi dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka pelayanan terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan guna peningkatan aksesibilitas dan mobilitas.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan.

#### **E. Struktur organisasi**

Untuk memperlancar kegiatan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya tugas yang jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelaksanaan tugas yang tumpang tindih maupun ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab dari para pelaksana organisasi. Oleh karena itu, perlu diusahakan terciptanya suatu team kerja yang kompak, saling

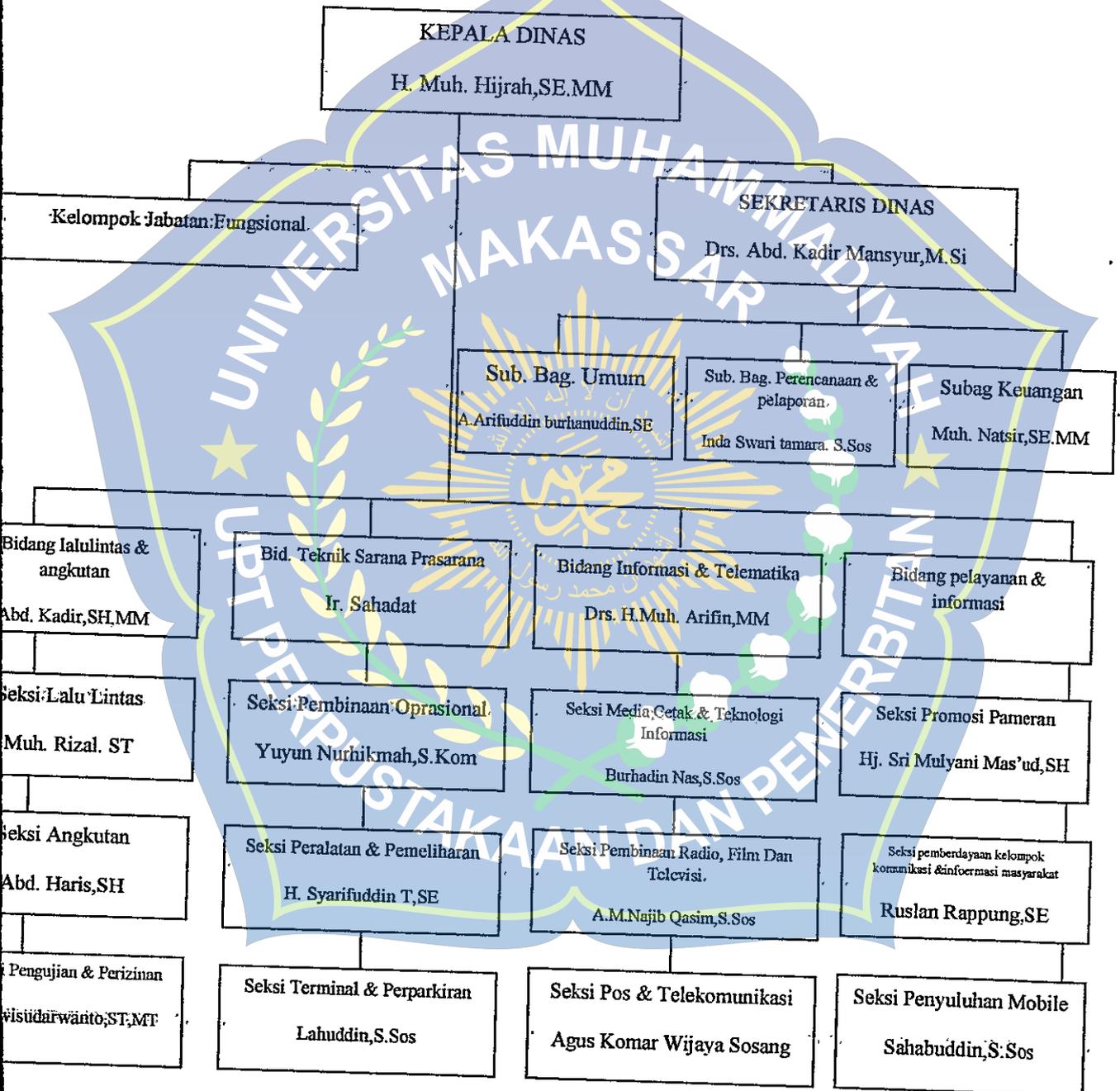


membantu, dan saling menunjang satu sama lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya pencapaian tujuan.

## STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### KABUPATEN GOWA





*Sumber: Dishubkominfo Gowa 2014*

## **F. Tugas Dan Tanggung Jawab**

Dengan melihat struktur organisasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika tersebut tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan tersebut, yaitu:

1. Kepala Dinas  
Penentu kebijakan yang terkait dilingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.
2. Sekretaris Dinas  
melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan terminal sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditentukan oleh kepala dinas
3. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian  
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
4. Sub. Bagian perencanaan dan pelaporan  
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
5. Sub. Bagian keuangan



merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### 6. Seksi Lalu Lintas

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Lalu Lintas.

Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas mengatur dan mengawasi kegiatan lalu lintas di lingkungan terminal, dimana dalam menjalankan tugasnya.

Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal.
- b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal.
- c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang ditetapkan.
- d. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang.
- e. Pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang.
- f. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal, yakni dengan jarak radius 100 m dari batas wilayah terminal.
- g. Penyidikan pelanggaran.



- h. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran.
- i. Pencatatan dan pelaporan jumlah bus dan penumpang yang datang maupun yang berangkat.
- j. Mengatur tarif angkutan.
- k. Mengawasi kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan.
- l. Mengawasi muatan yang diizinkan.
- m. Mengawasi pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.
- n. Mengawasi terminal serta fasilitas penumpang sesuai peruntukannya

#### 7. Seksi Angkutan

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Angkutan.

#### 8. Seksi Pengujian Dan Perizinan

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pengujian, dan Perizinan.

#### 9. Seksi Pembinaan Operasional

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pembinaan Operasional .

#### 10. Seksi Pemeliharaan

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Peralatan dan Pemeliharaan.



Fungsi Seksi Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan dan keindahan seluruh bangunan, taman, kebun, dan tempat-tempat pelayanan umum lainnya.
  - b. Melaksanakan kegiatan perbaikan dan perawatan bangunan serta perlengkapannya.
  - c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan semua peralatan kebersihan.
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Terminal Cappa'bungaya
11. Seksi Terminal Dan Perparkiran  
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Terminal dan Perparkiran.
  12. Seksi Media Cetak Dan Teknologi Informasi  
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi.
  13. Seksi Pembinaan Radio, Film Dan Televisi  
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pembinaan Radio, Film dan Televisi.
  14. Seksi Pos Dan Telekomunikasi



merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi.

15. Seksi Promosi Pameran Dan Penerbitan

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan.

16. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Dan Informasi Masyarakat

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat.

17. Seksi Penyuluhan Mobile

merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pelayanan Mobile.

18. Monografi Terminal Cappa'bungaya.

Alamat : Jl. Pallangga raya No.4

Kelurahan Pallangga, Kecamatan Pallangga,

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

1. Data pelataran / landasan untuk bus



**Tabel I.1**

Data pelataran / landasan untuk bus

No	Peruntukan	Kapasitas	Luas
1.	Kedatangan bus/ penurunan Penumpang.	4 bus	2.235 m <sup>2</sup>
2.	Pemberangkatan Timur.	2 bus	6.420 m <sup>2</sup>
3.	Pemberangkatan Barat.	2 bus	3.996 m <sup>2</sup>
4.	istirahat Timur.	4 bus	6.261 m <sup>2</sup>

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

## 2. Fasilitas untuk pengunjung / penumpang

Pelataran parkir kendaraan pengunjung 3.400 m<sup>2</sup>

Emplasemen 1.806 m<sup>2</sup>

Ruang Tunggu ( 2 lokasi ) 694 m<sup>2</sup>

Kamar Kecil ( 4 unit ) 262 m<sup>2</sup>

Masjid 153 m<sup>2</sup>

## 3. Himpunan / kelompok dan jumlah anggota pencari nafkah di terminal

**Tabel I.2**

Himpunan / kelompok dan jumlah anggota pencari nafkah di terminal.

No.	Nama kelompok/ Organisasi	Jumlah Anggota
1.	Himpunan Pemilik Kios & Los (HPKL)	25 Orang
2.	Kelompok Pembersih Bus Terminal- (KPBT)Kelompok Angkutan Barang	19 Orang
		35 Orang
3.	Terminal (KABT)	



4.	Asongan	12 Orang.
	Jumlah	91 Orang

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

#### 4. Daftar Tarif Retribusi Terminal

Tabel I.3

##### Daftar tarif retribusi terminal

No.	Jenis TPR	Besarnya tarif	Ket.
1.	a. BUS CEPAT AKAP / AKDP	Rp 2.000,-	1 X Parkir
	b. BUS LAMBAT AKAP / AKDP	Rp 1.500,-	
2.	BUS PERKOTAAN		
	a. Bus Besar	Rp 1.500,-	1 X Masuk
	Bus Sedang		
	b. Bus Kecil	Rp 1.000,-	1 X Masuk
3.	BUS KOTA		
	a. Bus Besar	Rp 1.500,-	1 X Masuk
	Bus Sedang		
	b. Bus Kecil	Rp 1.000,-	1 X Masuk
4.	Taksi dan mobil	Rp 2.000,-	1 X Masuk (Max 3 jam)
5.	Sepeda Motor ( Parkir )	Rp 1.500,-	1 X Masuk



6.	Sepeda Motor ( Penitipan ) Termasuk Helm	Rp 2.000,-	(Max 3 jam) 1 X Penitipan (Max 24 Jam)
7.	Sepeda ( Penitipan )	Rp 1.000,-	1 X Penitipan (Max 24 Jam)
8.	Becak	Rp 1.000,-	1 X Penitipan (Max 24 Jam)
9.	Kios	Rp 1.500,-	Perhari
10.	Retribusi Asongan	Rp 1.000,-	Perhari
11.	Toilet umum	Rp 1.500,-	1 X Masuk

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.





## BAB V

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Retribusi Daerah.

Retribusi terminal merupakan bagian dari retribusi daerah yang ada di Kabupaten Gowa. Penulis akan menganalisis kontribusi retribusi terminal Angkutan Darat terhadap retribusi daerah dari segi realisasi dan target.

1. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah Dari Segi Realisasi Penerimaan.

Tabel II.1

Realisasi Retribusi Terminal Angkutan Terhadap Realisasi Retribusi Daerah

No	Tahun	Realisasi retribusi terminal (Rp)	Realisasi retribusi daerah (Rp)	%
1.	2010	3.306.002.860	30.327.843.198	10,90%
2.	2011	3.018.570.080	31.738.906.507	9,51%
3.	2012	3.085.551.890	33.359.233.949	9,25%
4.	2013	3.291.679.200	39.447.439.832	8,34%
Rata-rata				9,50%

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi realisasi retribusi terminal terhadap realisasi retribusi daerah adalah sebagai berikut.



$$K = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100\%$$

K : Kontribusi

RT : Jumlah realisasi Retribusi Terminal

RD : Jumlah realisasi Retribusi Daerah

Dilihat dari rata-rata kontribusi realisasi retribusi terminal angkutan darat terhadap realisasi retribusi daerah di Kabupaten Gowa antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 9,50%. Persentase ini merupakan angka yang kecil atau dinilai sangat kurang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi retribusi terminal mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2010 realisasi retribusi terminal sebesar Rp 3.306.002.860,-. Kemudian tahun 2011 turun menjadi Rp 3.018.570.080,-. Tahun berikutnya yaitu tahun 2012 mengalami kenaikan sejumlah lebih dari 60 Juta Rupiah. Di tahun 2013 terjadi kenaikan kembali menjadi Rp 3.291.679.200,-.

## 2. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah Dari Segi Target Penerimaan.

Tabel di bawah ini akan menunjukkan seberapa besar kontribusi target retribusi terminal terhadap target retribusi daerah.



Tabel II.2

## Target Retribusi Terminal Terhadap Target Retribusi Daerah

No	Tahun	Target Retribusi Terminal (Rp)	Target Retribusi Daerah (Rp)	%
1.	2010	3.460.000.000	28.652.693.200	12,07%
2.	2011	3.460.000.000	32.206.012.000	10,74%
3.	2012	3.834.677.000	33.969.651.000	11,29%
4.	2013	3.882.677.000	35.575.696.100	10,91%
Rata-rata				11,25%

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi target retribusi terminal terhadap target retribusi daerah adalah sebagai berikut.

$$K = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100\%$$

K : Kontribusi

RT : Jumlah target Retribusi Terminal

RD : Jumlah target Retribusi Daerah

Target retribusi terminal tahun 2010 adalah 12,07 % dari target retribusi daerah. Pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 10,74 %. Di tahun 2012 dan 2013 target retribusi terminal terhadap target retribusi daerah berturut-turut sebesar 11,29 % dan 10,91 %.

Setelah menganalisis kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah dari segi realisasi dan target penerimaan, penulis membandingkan kontribusi



retribusi terminal dari segi realisasi penerimaan dengan kontribusi retribusi terminal dari segi target penerimaan.

Perbandingan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.3

Perbandingan Kontribusi Retribusi Terminal angkutan Darat Dari Segi Realisasi Dan Target Penerimaan Terhadap Retribusi Daerah

No	Tahun	Kontribusi dari segi Realisasi penerimaan (%)	Kontribusi dari segi Target penerimaan (%)
1.	2010	10,90%	12,07%
2.	2011	9,51%	10,74%
3.	2012	9,25%	11,29%
4.	2013	8,34%	10,91%

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Pada tahun 2010 kontribusi retribusi terminal dari segi realisasi penerimaan sebesar 10,90%, sedangkan kontribusi dari segi target penerimaannya adalah 12,07%. Kontribusi retribusi terminal dari segi realisasi penerimaan masih kurang sebesar 1,17% dari kontribusi retribusi terminal dari segi target penerimaan. Di tahun 2011 mengalami penurunan kontribusi retribusi terminal baik dari segi realisasi penerimaan maupun dari target penerimaan menjadi 9,51% untuk realisasi penerimaan dan 10,74% untuk target penerimaan. Tahun berikutnya yaitu tahun 2012, kontribusi retribusi terminal dari segi target penerimaan mengalami kenaikan menjadi 11,29%. Tetapi kontribusi dari segi realisasi penerimaan mengalami penurunan menjadi 9,25%. Tahun 2013 kontribusi retribusi terminal



dilihat dari segi realisasi dan target penerimaan kembali mengalami penurunan berturut-turut sebesar 8,34% dan 10,91%.

### B. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi terminal angkutan merupakan bagian dari retribusi daerah yang ada di Kota Surakarta. Penulis akan menganalisis kontribusi retribusi terminal Angkutan Darat terhadap retribusi daerah dari segi realisasi dan target.

1. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari Segi Realisasi Penerimaan.

Tabel II.4

Realisasi Retribusi Terminal Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi Retribusi Terminal (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1.	2010	3.306.002.860	66.052.438.987	5,00%
2.	2011	3.018.570.080	78.585.751.288	3,84%
3.	2012	3.085.551.890	89.430.997.982	3,45%
4.	2013	3.291.679.200	102.989.919.369	3,20%
Rata-rata				3,87%

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi realisasi retribusi Angkutan terminal terhadap realisasi pendapatan asli daerah.



$$\bar{K} = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100\%$$

K : Kontribusi

RT : Jumlah realisasi Retribusi Terminal

PAD : Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata kontribusi realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 3,87%, persentase kontribusi realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap PAD masih sangat kurang. Mengingat unsur PAD sangat banyak dan beragam.

2. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari Segi Target Penerimaan.

Tabel II.5  
Target Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi Retribusi Terminal (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1.	2010	3.460.000.000	62.602.084.457	5,53%
2.	2011	3.460.000.000	74.709.440.000	4,63%
3.	2012	3.834.677.000	88.034.379.000	4,36%
4.	2013	3.882.677.000	45.781.000.000	8,48%
Rata-rata				5,75%

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Gowa.



Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi target retribusi terminal terhadap target pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut.

$$K = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100\%$$

K : Kontribusi

RT : Jumlah target Retribusi Terminal

PAD : Jumlah target Pendapatan Asli Daerah

Tabel II.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2013 kontribusi target retribusi terminal Cappa' bungaya terhadap target pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 kontribusi target retribusi Kabupaten Gowa terhadap target pendapatan asli daerah adalah sebesar 5,53 %. Untuk tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,63 %. Sedangkan di tahun 2012 dan tahun 2013 kontribusi target retribusi terminal terhadap target pendapatan asli daerah sebesar 4,36 % dan 8,48 %. Secara keseluruhan target retribusi terminal berperan sebesar 5,75 % terhadap total target pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa. Melihat persentase tersebut kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa masih kurang.

### C. Hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi terminal

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal pihak UPTD terminal menemui beberapa hambatan yang mengakibatkan pemungutannya berjalan kurang baik, diantaranya:

1. Bus yang masuk ke terminal sudah banyak berkurang sehingga berkurang pula penerimaan pungutan retribusi.



2. Banyaknya kendaraan pribadi sekarang ini.
3. Cuaca Buruk yang menyebabkan banjir sehingga mengakibatkan bis-bis jarang beroperasi.
4. Penunggakan pembayaran sewa kios, loket penjualan tiket oleh penyewa.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Retribusi Terminal di lapangan adalah kurang sadarnya pengguna jasa terminal untuk membayar retribusi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut UPTD Terminal Cappa' bungaya melakukan beberapa langkah dengan cara :

1. Mengurangi beban pemakaian listrik dengan cara pemisahaan penggunaan listrik untuk penerangan terminal dengan konsumsi listrik untuk kios.
2. Menertibkan semua jenis SIP ( Surat Izin Penempatan).
3. Pendataan ulang penyewa kios, loket penjualan tiket, dan los.
4. Melakukan penertiban kepada semua pengguna jasa terminal.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil dari analisis dan pembahasan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan pemungutan retribusi terminal dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah dinilai masih sangat kurang dalam kontribusinya untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Namun kekurangan tersebut masih wajar mengingat jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan asli daerah sangat beragam.

Pencapaian target yang ditetapkan masih belum memenuhi harapan yang dikehendaki UPTD Terminal Cappa' bungaya Kabupaten Gowa. Selama 4 tahun terakhir realisasi penerimaan retribusi terminal di bawah dari target penerimaan retribusi terminal, tetapi 3 tahun belakangan ini realisasi penerimaan retribusi terminal mengalami kenaikan yang berarti.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Gowa, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran –saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pihak luar. Oleh karena itu PAD sebagai cerminan kemandirian suatu daerah harus terus ditingkatkan, dengan mengoptimalkan semua sumber-sumber PAD yang



dimiliki daerah. Seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, agar anggaran yang ditetapkan dapat terealisasi sepenuhnya.

2. PAD sebagai salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah penerimaan daerah. Oleh karena itu PAD harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah untuk terus ditingkatkan. Terutama komponennya seperti pajak daerah dan retribusi daerah, agar jumlah yang diperoleh setiap tahun tidak mengalami penurunan dan dapat terealisasi sesuai yang dianggarkan. Sehingga PAD dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan daerah dan juga memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam membiayai belanja rutin.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2007-2010 di Kabupaten Gowa, diharapkan untuk penelitian selanjutnya objek penelitiannya dilakukan di beberapa kabupaten sehingga terdapat perbandingan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.
4. Penilaian beberapa pokok pikiran dalam manajemen organisasi
  1. Proses  
Proses adalah suatu cara yang sistematis untuk melaksanakan suatu manajemen di definisikan sebagai suatu proses karena semua manager, apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.



## 2. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada dan kegiatan mereka berdasarkan pada suatu cara, rencana dan logika.

## 3. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menentukan orang-orang pada setiap aktifitas, penyediaan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan pada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.

## 4. Pengarahan

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerjasama dengan efektif dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

## 5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana dan pengukuran serta perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.



Penulis juga merekomendasikan beberapa hal yang bisa meningkatkan kinerja UPTD Terminal Cappa' bungaya Kabupaten Gowa berdasarkan temuan yang didapat selama penelitian berlangsung. Hal-hal tersebut adalah :

1. Bertindak tegas terhadap pengguna jasa terminal khususnya penyewa kios, penyewa loket penjualan tiket dan los agar membayar uang sewa tepat pada waktu yang ditentukan.
2. Mensosialisasikan kepada pengguna jasa terminal untuk mematuhi peraturan terminal.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, msp : Jakarta
- Dasril, Munir dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Departemen Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Angkutan Jalan*. 1995. Jakarta.
- Dharmaagus *Organisasi, perilaku, struktur dan proses* (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. 1992
- Kristadi JB, *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Alumni, Bandung, 1986
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi ke-2, Yogyakarta : ANDI
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi*, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa (*anggaran dan belanja daerah Kab. Gowa Tahun 2003 Nomor : 11*)
- Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk. II Gowa (*Lembaran Daerah Kab. Daerah No. 1 Tahun 1999 Seri B Nomor 1*) 02 Tahun 1998
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa (*Lembaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2012 Nomor : 04*) nomor 04 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk. II Gowa (*Lembaran Daerah Kab. Daerah No. 1 Tahun 1999 Seri B Nomor 1*) *Retribusi Terminal*
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa (*Lembaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2011 Nomor : 18*)
- Sudjana, 2002 *Metode Statistika*. Tarsito, Bandung
- Susilowati „Desinta. 2008 ” *Kontribusi Retribusi Terminal Bus Tirtonadi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002-2006*”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasikan.



UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

UU RI. 2001. *Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah.*

UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*

Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.*







**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI

USULAN JUDUL PENELITIAN

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Manajemen

Fak. Ekonomi Unismuh Makassar

Di,-

Makassar

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Nama : FITRIA DJAUHARI

No. Stambuk : 10572 02905 10

Jurusan : MANAJEMEN

Dengan ini mengajukan judul sekiranya dapat disetujui, adapun judul yang saya ajukan adalah:

1. Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kab. Gowa.
2. Pengaruh Promosi Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Kerja Karyawan Pada Radio Siaran Pemerintah (RSPD) Rewako 100,4 Fm di Gowa.
3. Hubungan Antara Tingkat Pelatihan Terhadap Motifasi Kerja Pegawai Pada DISHUBKOMINFO Gowa.

Dengan permohonan ini saya buat, atas perhatiannya dan kesediaan bapak/ ibu saya ucapkan terimakasih

*Wassalam*

Makassar, 4 Februari 2014

Menyetujui:

Ketua jurusan

Mahasiswa

Dra. Murni, M.Si

Fitria Djauhari

Catatan: pembimbing yang disetujui

1. Pembimbing I :
2. Pembimbing II :





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
No. 03/05/A.4-II/II/35/2014

*Tentang*

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV. MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah :

- Menimbang : 1. Untuk tertib administrasi dalam penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dilingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan untuk dosen pembimbing.  
2. Untuk maksud diatas, maka perlu diatur dalam satu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999  
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar 2001  
3. Peraturan yang berlaku di lingkungan Univ. Muhammadiyah Makassar
- Memperhatikan : Usulan Kaprodi Manajemen, pada tanggal 05 Februari 2014 M.

Dengan memohon inayah Allah Swt,

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Fitria Djauhari  
Stambuk : 105720290510  
Program Studi : Manajemen  
Pembimbing I : Moh. Aris Pasigai, SE., MM  
Pembimbing II : Edi Jusriadi, SE., MM

Judul Skripsi : **Pengaruh Manajemen Orgnisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kab. Gowa**

- Kedua : Seluruh pembiayaan menyangkut dosen pembimbing dan penguji dibebankan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Unismuh Makassar.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah yudisium mahasiswa yang bersangkutan.
- Keempat : Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 Februari 2014



**Dr. H. Mahmud Nuhung, MA**

KEAM: 497/794

Tembusan :





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 276/05/C.4-II/VIII/35/2014  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 15 Syawal 1435 H.  
11 Agustus 2014 M.

Kepada Yth.  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
di-  
Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Fitria Djauhari**  
Stambuk : **10572 02905 10**  
Jurusan : **Manajemen**  
Judul Penelitian : **Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai jadwal penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.  
NBM. 497 794,-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs
4. Arsip.





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com

Nomor : 2640/Izn-05/C.4-VIII/VIII/35/2014  
Lamp : 1 (satu) rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Syawal 1435 H  
13 Agustus 2014 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov.Sulsel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 276/05/C.4-II/VIII/1435/2014 tanggal 11 Agustus 2014, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FITRIA DJAUHARI**  
No. Stambuk : **105 72 02905 10**  
Fakultas : **Ekonomi**  
Jurusan : **Manajemen**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**“Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.”**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Agustus s/d 16 Oktober 2014

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua,  
Ub. Sekretaris LP3M,

  
**Ir. Abubakar Idhan, MP**

NBM 101 7716









PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**ADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu  
Jln. Bougenville No 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
MAKASSAR 90222

Makassar, 19 Agustus 2014

Kepada

Nomor : /2429/P2T-BKPM/19.36P/08/VII/2014

Tempiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Bupati Gowa

di-

Sungguminasa

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2460/Izn-05/C.4-VIII/VII/35/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : Fitrija Djauhari  
Nomor Pokok : 105 72 02905 10  
Program Studi : Manajemen  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"PENGARUH MANAJEMEN ORGANISASI TERMINAL ANGKUTAN DARAT TERHADAP RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Agustus s/d 16 Oktober 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan sepertiunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PIL. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Seisro Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



H. IRWAN YASIN LIMPO, SH.

Rangkal : Pembina Utama Madya, IV/d

NP : 19670824 199403 1 008

REMBUSAN : Kepada Yth :

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;

2. Perihal

### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adatistiadat setempat
4. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & LINMAS

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 20 Agustus 2014

K e p a d a

Nomor : 070/1845 /BKB.P.L/2014  
Tempat : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ka. Dinas Perhubungan Komunikasi  
dan Informatika Kab. Gowa  
Di-  
T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor : 12429/P2T-BKPMD/19.36P/08/VII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Fitria Djauhari**  
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 1 Desember 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Limbung

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis dan Disertasi di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **“PENGARUH MANAJEMEN ORGANISASI TERMINAL ANGKUTAN DARAT TERHADAP RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA”**.

Selama : 19 Agustus s/d 16 Oktober 2014  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA  
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Pallangga No. Telp. (0411) 888 221

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NO: 398/DISHUB/IX/2014**

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gowa, menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA DJAUHARI  
Tempat/ tanggal lahir : Cilacap, Jawa tengah, 1 Desember 1990  
Nim : 10572 02905 10  
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gowa, untuk kepentingan penulisan Skripsi dengan judul “ *Pengaruh Manajemen Organisasi Terminal Angkutan Darat Terhadap Distribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa*”.

Demikian surat ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pallangga, 04 September 2014

KEPALA DINAS

H. Muh. Hijrah, SE. MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19590701199307 1 001

